

**KEKUATAN *VISUM ET REFERTUM* DALAM PERKARA
PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR PUTUSAN : NO. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg DAN
PUTUSAN PERKARA NOMOR : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg PADA
PENGADILAN NEGERI PADANG)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**



OLEH :
EKKY RIZKI ASRIL
1520112052

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Elwi Danil. SH.MH
Pembimbing II : Dr. Siska Elvandari, SH.MH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

	No. Alumni Universitas	Ekky Rizki Asril	No. Alumni Fakultas
BIODATA :			
a). Tempat/Tanggal Lahir : Manggung/27 September 1985, b). Nama Orang Tua : Asril Karim c). Program Studi : Magister Hukum, d). Fakultas : Hukum, e). BP: 1520112052, f). Tanggal Lulus: 29 Desember 2017, g). Predikat Lulus : Sangat memuaskan, h). IPK: 3,51, i). Lama Studi: dua tahun empat bulan, j). Alamat: Jalan Siti Manggopoh No.16 Desa Manggung Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.			
KEKUATAN VISUM ET REFERTUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR PUTUSAN : NO. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg DAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg PADA PENGADILAN NEGERI PADANG)			
(Tesis oleh Ekky Rizki Asril, Pembimbing I: Prof. DR. H. Elwi Danil, SH.MH, Pembimbing II: DR. SISKA ELVANDARI, SH. M.H)			
ABSTRAK			
<p>Di dalam KUHP tindak pidana penganiayaan yang termasuk di dalam Acara Pemeriksaan Biasa dalam Pasal 351, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355 dan Pasal 356 KUHP sedangkan tindak Pidana yang termasuk kedalam Acara Pemeriksaan Cepat adalah Pasal 352 KUHP. Berdasarkan data penanganan perkara tindak Pidana penganiayaan perkara dengan penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan perkara dengan penerapan Pasal 352 ayat (1) KUHP perkara No. Put : No. 24/Pid.C/2017/PN.Pdg dimana terhadap perkara tersebut terdapat Hasil <i>Visum Et Refertum</i> dengan kesimpulan yang sama, kemudian telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Padang dengan memberikan putusan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Padang (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg) dan Kekuatan <i>Visum Et Refertum</i> dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP (terhadap Perkara No. Put : No. 192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan Perkara Nomor : 24/Pid.C/2017/PN.Pdg), dengan menggunakan metodologi penelitian <i>yuridis normatif</i>. Data yang dipergunakan adalah data Sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan Data Primer yang diperoleh dari perpustakaan dan koleksi pustaka pribadi penulis yang dilakukan dengan cara studi pustaka atau literatur. Analisa data yang digunakan analisis normatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. Hasil penelitian yang diperoleh : 1). Tidak adanya Kepastian Hukum dalam penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP. 2). Sebagai salah satu Alat Bukti Surat Sesuai Pasal 184 huruf c KUHAP dan teori pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu <i>Negatief Wattelijk bewijsttheorie</i> Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak mempertimbangkan hasil <i>Visum et Refertum</i> dalam Putusannya. Kesimpulan: 1) Tidak adanya kepastian hukum dalam Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 352 ayat (1) KUHP pada Pengadilan Negeri Padang dimana kepastian merupakan salah satu tujuan dari hukum serta hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan wibawa di mata masyarakat hal ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang dengan putusan No.192/Pid.B/2015/PN.Pdg dan perkara dengan Nomor : 24/Pid.C/2017/PNPdg dengan kualifikasi luka yang sama yaitu berupa luka lecet serta dengan kesimpulan hasil <i>Visum et Refertum</i> yang sama yaitu tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Dimana hakim pada Pengadilan Negeri Padang memutus perkara dengan penerapan pasal yang berbeda. 2) Hasil <i>Visum et Refertum</i> sebagai salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 huruf C KUHAP dan Pasal 183 KUHAP dan sesuai dengan Teori Pembuktian yang dianut di Indonesia yaitu <i>Negatief Wattelijk bewijsttheorie</i> dan makna dari keyakinan hakim bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai manusia bukan lagi <i>conviction intime</i> ataupun <i>conviction rationee</i> akan tetapi keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut undang-undang. Dimana Hasil <i>Visum et Refertum</i> sebagai salah satu alat bukti surat tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam putusannya.</p>			

**THE STRENGHT OF VISUM ET REFERTUM IN CASES OF CRIME OF
PERSECUTION (CASE STUDY CASE NOMOR : 24/PID.C/2017/PN.Pdg AT THE PADANG
STATE COURT).**

(Tesis oleh Ekky Rizki Asril, Pembimbing I: Prof. DR. H. Elwi Danil, SH.MH, Pembimbing II: DR. SISKA ELVANDARI, SH. M.H)

ABSTRACT

In the KUHP of the offense of persecution included in the ordinary examination of article 351, article 353, article 354, article 355 and article 356 KUHP whereas the offense included in the rapid inspection is article 352 KUHP. Based on data handling cases of criminal prosecution case with the application of article 351 paragraph 1 KUHP namely case decision number 192/Pid.B/2015/PN.Pdg and cases with the application of article 352 paragraph 1 case of decision number 24/Pid.C/2017/PN.Pdg where to the case there is the result of visum et refertum with the same conclusion, then has been broken by the judge of the padang state court by giving a different verdict. This research aim to know how applying of article 351 paragraph 1 KUHP and article 352 paragraph 1 KUHP in state court of padang (to case of decision number 192/Pid.B/2015/PN.Pdg and case of decision number 24/Pid.C/2017/PN.Pdg) and the force of the visum et refertum in article 351 paragraph 1 KUHP and article 352 paragraph 1 KUHP (against case of decision number 192/Pid.B/2015/PN.Pdg and case of decision number 24/Pid.C/2017/PN.Pdg), by using normative juridical research methodology. The data used is secondary data, that is supporting the completeness of the data primair obtained from the library and collection of personal libraries writers conducted by lietarature study of literature. Data analysis used normative analysis, ie collected data pouried in the form og logical and theathematical description, then in the analysis to obtain clarity of problem solving, then deductive deductions are dawn, that is from the general beraifat to the things that are special. Research results obtained 1) the absence of legal certainty in the application of article 351 paragraph 1 KUHP and article 352 paragraph 1 KUHP. 2) as one of the evidences of the letter in accordance with article 184 letter c KUHAP and the theory of proof that in adult in Indonesia that is *Negatief Wattelijk bewijstheorie* the court judges of the padang did not consider the results of the *Visum Et Refertum* in its decision. Conclusion : 1) The absence of legal certainty in the application of article 351 paragraph 1 KUHP and article 352 paragraph 1 KUHP on the destruction of the land of the padang where certainty is one of the objectives of law and law witouht the value of certainty of loss of authority in the eyes of society this is seen in the verdict of the court of the land of padang with the verdict number 192/Pid.B/2015/PN.Pdg and cases with decision number 24/Pid.C/2017/PNPdg, with the same wound qualification in the form of blisters and with the conclusion of bthe same *Visum Et Refertum* result that does not cause disease or obstacles in carrying out daily work. Where the judges in the state court of the padang decided the case with the application of different article.. 2) the result of the *Visum Et Refertum* as one of the evidences referred to in article 184 letter c KUHAP and article 183 KUHAP and in accordance with the theory of evidence held in Indonesia namely *Negatief Wattelijk bewijstheorie* and the meaning of the judge's conviction is not interpreted the sense of personal judges as human beings no longer *conviction intime* or *conviction rasione* but judge's conviction based on evidence of lawful evidence. Where the result of the *Visum Et Rereturum* as one of the proof of letter is not considered by the judges in its decision.

Tesis ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Akhir Magister Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Desember 2017.

Abstrak telah disetujui oleh tim penguji,

Tanda Tangan	Prof. DR. H. Elwi Danil, SH. MH	Prof. DR. J. ADR. Siska Ismansyah, SH.MH	DR. H. A. Irzal Rias, SH, MH	Yoserwan, SH. MH. LLM
Nama terang				

Mengetahui, Ketua Program Studi :	_____ Prof. Dr. H. Yuliandri, SH. MH	Mahasiswa yang bersangkutan:	_____ Ekky Rizki Asril
Alumnus telah mendaftar ke Fakultas Universitas dan mendapat nomor alumnus			

	Petugas Fakultas/Universitas
No. Alumnus Fakultas	Nomor : TTD:
No. Alumnus Universitas	Nomor : TTD:

